



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TATANG GARJITO**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **107674**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.693.492.000**

1. Tanah Seluas 3.020 m2 di MADIUN, WARISAN Rp. 61.400.000
2. Tanah Seluas 2.061 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 52.140.000
3. Tanah Seluas 1.579 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
4. Tanah Seluas 2.088 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 2.972 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 64.400.000
6. Tanah Seluas 2.852 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 63.200.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2.551 m2/80 m2 di MADIUN, WARISAN Rp. 250.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 268 m2/80 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. Tanah Seluas 193 m2 di MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 8.352.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/57 m2 di PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/200 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 431.500.000**



1. MOBIL, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOBIL, TOYOTA NEW FORTUNER NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL LUX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 151.393.800

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.775.767.731

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.052.153.531

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.052.153.531

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.